



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1640/SEK/OT.01.2/7/2021 Jakarta, 26 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Responden Dalam Pelaksanaan SPI

Yth. (Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/225/LIT.05-155/044/2021 tanggal 7 April 2021 hal Kerjasama Survei Penilaian Integritas 2021 dan surat Kepala Badan Pengawasan Nomor 1399/BP/OT.01.2/7/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Penyampaian Data Dukung Persiapan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dalam rangka persiapan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan dilaksanakan oleh KPK dan bersifat mandatori yang berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui serangkaian kegiatan berupa persiapan data populasi pegawai dan pengguna layanan, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, maka tahun 2021 akan dilaksanakan oleh KPK sehingga SPI KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.
2. Diharapkan seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang ditunjuk mewakili Mahkamah Agung dalam partisipasi SPI dapat menyampaikan nama-nama responden melalui tautan https://bit.ly/SPI2021_MARI paling lambat hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan data responden (pihak eksternal pengadilan yaitu advokat/pengacara, mahasiswa atau *stakeholder*) sebagai pengguna layanan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebanyak 50 responden atau jika yang menggunakan layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada.

- b. Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan data responden (pihak eksternal pengadilan yaitu advokat/pengacara, mahasiswa atau stakeholder) sebagai pengguna layanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 100 (seratus) responden atau jika yang menggunakan layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- c. Formulir data responden pengguna layanan, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengadilan	Nama Layanan yang Diterima	Nama Responden	Tgl/Bln/Thn Mengurus Layanan Pengadilan	No. HP (Whatsapp) aktif	e-mail aktif
1.						
2.						
3.						
dst.						

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Abu Samah (+628123919770) dan Sdr. Syarifullah M. Nur (+6282122137785).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 1637/SEK/OT.01.2/7/2021
 Tanggal : 26 Juli 2021

1. Lingkungan Peradilan Umum

No	Tingkat Banding	No	KELAS I			No	KELAS I B	No	KELAS II
			A KHUSUS	A					
1	Palembang	1	Jakarta Pusat	1	Banda Aceh	1	Pematangsiantar	1	Calang
2	Jakarta	2	Tangerang	2	Palembang	2	Tebing Tinggi	2	Idi
3	Banten	3	Bandung	3	Lubuk Pakam	3	Pangkal Pinang	3	Takengon
4	Bandung	4	Semarang	4	Padang	4	Sungailiat	4	Blangkajeren
5	Yogyakarta			5	Pekanbaru	5	Cirebon	5	Meureudu
6	Pontianak			6	Tanjung Pinang	6	Sukabumi	6	Suka Makmue
7	Gorontalo			7	Batam	7	Cianjur	7	Tarutung
8	Mataram			8	Dumai	8	Kudus	8	Balige
9	Ambon			9	Jambi	9	Pemalang	9	Sibuhuan
				10	Bengkulu	10	Temanggung	10	Batusangkar
				11	Tanjung Karang	11	Purwodadi	11	Muaro
				12	Bale Bandung	12	Blora	12	Pasaman Barat
				13	Cibinong	13	Kebumen	13	Rengat
				14	Tasikmalaya	14	Brebes	14	Tembilahan
				15	Klaten	15	Bantul	15	Pasir Pangaraian
				16	Pati	16	Wates	16	Rokan Hilir
				17	Sragen	17	Madiun	17	Muara Bulian
				18	Cilacap	18	Bondowoso	18	Sengeti
				19	Sukoharjo	19	Mojokerto	19	Tj. Jabung Timur
				20	Tegal	20	Lamongan	20	Manna
				21	Yogyakarta	21	Martapura	21	Arga Makmur
				22	Sleman	22	Tarakan	22	Tubei
				23	Jember	23	Mamuju	23	Tais
				24	Malang	24	Bau-Bau	24	Muara Enim
				25	Banyuwangi	25	Tondano	25	Prabumulih
				26	Gresik	26	Bitung	26	Pandeglang

2. Lingkungan Peradilan Agama

No	Tingkat Banding	No	KELAS I		No	KELAS II	
			A	B			
1	Banten	1	Medan	1	Stabat	1	MSy. Meulaboh
2	Jakarta	2	Bengkulu	2	Rantau Prapat	2	MSy. Meureudu
3	Bandung	3	Metro	3	Rengat	3	MSy. Blangkajeren
4	Banjarmasin	4	Tangerang	4	Sengeti	4	MSy. Calang
5	Palangkaraya	5	Jakarta Timur	5	Kayu Agung	5	MSy. Sinabang
6	Samarinda	6	Jakarta Utara	6	Tanjung Pandan	6	Pematang Siantar
7	Kendari	7	Jakarta Barat	7	Gunung Sugih	7	Kota Padang Sidempuan
8	Manado	8	Jakarta Selatan	8	Kalianda	8	Sei Rampah
		9	Bandung	9	Tanggamus	9	Painan
		10	Kota Cimahi	10	Cianjur	10	Maninjau
		11	Kuningan	11	Jepara	11	Teluk Kuantan
		12	Bekasi	12	Salatiga	12	Kuala Tungkal
		13	Cibinong	13	Kudus	13	Sungai Penuh
		14	Brebes	14	Banymas	14	Sarolangun
		15	Pekalongan	15	Mungkid	15	Muara Sabak
		16	Sragen	16	Ambarawa	16	Muara Tebo
		17	Kebumen	17	Trenggalek	17	Martapura
		18	Kota Malang	18	Pacitan	18	Muaradua
		19	Banjarmasin	19	Sumenep	19	Prabumulih
		20	Samarinda	20	Kab. Madiun	20	Lebong
		21	Makassar	21	Amuntai	21	Tais
		22	Watampone	22	Pelaihari	22	Kepahiang
		23	Jayapura	23	Pangkalan Bun	23	Gedong Tataan
				24	Sambas	24	Sukadana
				25	Sengkang	25	Kota Banjar
				26	Pare-Pare	26	Soreang
				27	Praya	27	Ngamprah
				28	Bima	28	Bawean
				29	Manokwari	29	Buntok

						30	Kasongan
						31	Tamiyang Layang
						32	Sanggau
						33	Putusibau
						34	Tanjung Redep
						35	Tarakan
						36	Bontang
						37	Sanggatta
						38	Nunukan
						39	Bulukumba
						40	Jeneponto
						41	Barru
						42	Selayar
						43	Parigi
						44	Unaaha
						45	Tondano
						46	Tilamuta
						47	Marisa
						48	Suwawa
						49	Bangli
						50	Gianjar
						51	Ruteng
						52	Atambua
						53	So'e
						54	Lewoleba
						55	Labuan Bajo
						56	Dataran Hunipopu
						57	Nabire
						58	Biak
						59	Wamena
						60	Serui
						61	Painai
						62	Kaimana



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, **23** Juli 2021

Nomor : **1399** /BP/OT.01.2/7/2021
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Data Dukung Persiapan Survei Penilaian Integritas KPK**

Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan data dukung persiapan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sesuai dengan Surat Pimpinan KPK Nomor B/225/LIT.05-155/044/2021 hal Kerjasama Survei Penilaian Integritas 2021 tanggal 7 April 2021. Kegiatan SPI bersifat mandatori dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kegiatan SPI Tahun 2021 berada di bawah koordinasi Inspektorat atau Satuan Pengawas Internal dengan didampingi oleh KPK melalui serangkaian kegiatan berupa **persiapan data populasi pegawai, pengguna layanan, dan eksper dengan format terlampir.**

Sebagai informasi, khusus untuk survei pengukuran Sub Komponen Hasil Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, mulai tahun ini akan menggunakan Angka/Indeks dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh KPK sehingga Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian PANRB tidak akan dilakukan mulai tahun ini sesuai dengan Surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pengdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/13/RB.01/2021 tentang Penyampaian Informasi Pemanfaatan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK sebagai Nilai Hasil Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam evaluasi RB.

Adapun hasil penyiapan data dukung SPI diuraikan sebagai berikut:

A. Penentuan satuan kerja/unit kerja yang akan dijadikan sampling.

1. Persiapan data dukung dimulai dengan melakukan pendampingan antara *Person In-Charge* (PIC) yang ditunjuk bersama KPK dalam menentukan sampling. Data dukung berupa Populasi yang melingkupi eselon I (lingkup pejabat eselon 2 dan eselon 3 dibawahnya) dan seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan dengan klasifikasi per kelas pengadilan yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi <https://www.random.org/integer-sets/> untuk memperoleh random sampling. Pendampingan dilakukan melalui zoom meeting dan terakhir pada tanggal 2 Juli 2021 dengan hasil berupa data satuan kerja/unit kerja (nama eselon 2 dan 3 serta nama

pengadilan di empat lingkungan peradilan) yang terpilih sebagai calon responden (terlampir);

2. Data yang terpilih kemudian dirinci nama aparatur/personil yang ada di masing-masing satuan kerja/unit kerja;
3. Untuk data pengguna layanan (eksternal), saat ini masih dilakukan penyusunan data, mengingat data tersebut perlu dimintakan ke masing-masing unit kerja. Untuk Pengadilan Tingkat Banding menyiapkan data responden (pihak eksternal/bukan dari pengadilan) seperti advocat, mahasiswa atau stakeholder yang telah menikmati layanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 50 responden atau jika yang menggunakan layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama menyiapkan daftar responden sebanyak 150 responden pihak eksternal misalnya para pihak pencari keadilan, advocat, mahasiswa atau stakeholder yang telah memperoleh layanan pengadilan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir namun apabila jumlah responden yang memperoleh layanan pengadilan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada;
4. Untuk data eksper perlu arahan lebih lanjut dari Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk menentukan nama-nama eksper sesuai dengan Formulir Populasi Eksper Surat Pimpinan KPK Nomor B/225/LIT.05-155/044/2021.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut atas penyiapan data dukung SPI KPK di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat segera meminta satuan kerja/unit kerja yang telah terpilih sebagai sampling untuk menyusun data pengguna layanan eksternal dan segera menyerahkan data dukung tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat tanggal 25 Juli 2021 melalui link: https://bit.ly/SPI2021_MARI mengingat batas waktu pengumpulan data dukung ke KPK terakhir pada tanggal 26 Juli 2021.
2. Untuk data Eksper dapat segera ditentukan sesuai dengan Formulir Populasi Eksper.

Demikian informasi ini kami sampaikan sebagai laporan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI


DWIARSO BUDI SANTIARTO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Para Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Arsip.

**REKAPITULASI KLASIFIKASI PENGADILAN NEGERI
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 TAHUN 2021**

No	TINGKAT BANDING	No	KELAS I		No	KELAS I B	No	KELAS II	
			A KHUSUS	A					
1	Palembang	1	Jakarta Pusat	1	Banda Aceh	1	Pematangsiantar	1	Calang
2	Jakarta	2	Tangerang	2	Palembang	2	Tebing Tinggi	2	Idi
3	Banten	3	Bandung	3	Lubuk Pakam	3	Pangkal Pinang	3	Takengon
4	Bandung	4	Semarang	4	Padang	4	Sungailiat	4	Blangkajeren
5	Yogyakarta			5	Pekanbaru	5	Cirebon	5	Meureudu
6	Pontianak			6	Tanjung Pinang	6	Sukabumi	6	Suka Makmue
7	Gorontalo			7	Batam	7	Cianjur	7	Tarutung
8	Mataram			8	Dumai	8	Kudus	8	Balige
9	Ambon			9	Jambi	9	Pemalang	9	Sibuhuan
				10	Bengkulu	10	Temanggung	10	Batusangkar
				11	Tanjung Karang	11	Purwodadi	11	Muaro
				12	Bale Bandung	12	Blora	12	Pasaman Barat
				13	Cibinong	13	Kebumen	13	Rengat
				14	Tasikmalaya	14	Brebes	14	Tembilahan
				15	Klaten	15	Bantul	15	Pasir Pangaraian
				16	Pati	16	Wates	16	Rokan Hilir
				17	Sragen	17	Madiun	17	Muara Bulian
				18	Cilacap	18	Bondowoso	18	Sengeti
				19	Sukoharjo	19	Mojokerto	19	Tj. Jabung Timur
				20	Tegal	20	Lamongan	20	Manna
				21	Yogyakarta	21	Martapura	21	Arga Makmur
				22	Sleman	22	Tarakan	22	Tubei
				23	Jember	23	Mamuju	23	Tais
				24	Malang	24	Bau-Bau	24	Muara Enim
				25	Banyuwangi	25	Tondano	25	Prabumulih
				26	Gresik	26	Bitung	26	Pandeglang
				27	Banjarmasin	27	Tabanan	27	Banyumas
				28	Pontianak	28	Raba Bima	28	Karanganyar
				29	Palangkaraya	29	Sumbawa Besar	29	Trenggalek
				30	Samarinda	30	Sorong	30	Amuntai
				31	Balikpapan			31	Tanjung
				32	Watampone			32	Pelaihari
				33	Sungguminasa			33	Paringin
				34	Palu			34	Sintang
				35	Kendari			35	Bengkayang
				36	Manado			36	Ngabang
				37	Denpasar			37	Tamiang Layang
				38	Mataram			38	Kasongan
				39	Kupang			39	Pulang Pisau
				40	Ambon			40	Nanga Bulik
				41	Maluku Utara			41	Tanah Grogot
				42	Jayapura			42	Takalar
								43	Polewali
								44	Malili
								45	Pasangkayu
								46	Belopa
								47	Luwuk
								48	Buol
								49	Raha
								50	Lasusua
								51	Amurang
								52	Amlapura
								53	So'e
								54	Maumere
								55	Waikabubak
								56	Kalabahi
								57	Lembata
								58	Tobelo
								59	Bobong
								60	Merauke
								61	Serui

**REKAPITULASI KLASIFIKASI PENGADILAN MILITER DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN 2021**

No	Bingkat Banding	TYPE PENGADILAN					
		No	A	No	B	No	C
1	DILMILTI II Jakarta	1	PTUN Serang	1	PTUN Pontianak	1	PTUN Jambi
2	PT. TUN Jakarta	2	PTUN Ujung Pandang	2	PTUN Denpasar	2	PTUN Pangkal Pinang
		3	DILMIL I-01 Banda Aceh	3	PTUN Manado	3	PTUN Gorontalo
		4	DILMIL I-02 Medan	4	DILMIL I-03 Padang		
		5	DILMIL II-08 Jakarta	5	DILMIL III-15 Kupang		
		6	DILMIL II-10 Semarang				

**REKAPITULASI KLASIFIKASI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2021**

No	Tingkat Banding	No	KELAS I		No	KELAS II	
			A	B			
1	Banten	1	Medan	1	Stabat	1	MSy. Meulaboh
2	Jakarta	2	Bengkulu	2	Rantau Prapat	2	MSy. Meureudu
3	Bandung	3	Metro	3	Rengat	3	MSy. Blangkajeren
4	Banjarmasin	4	Tangerang	4	Sengeti	4	MSy. Calang
5	Palangkaraya	5	Jakarta Timur	5	Kayu Agung	5	MSy. Sinabang
6	Samarinda	6	Jakarta Utara	6	Tanjung Pandan	6	Pematang Siantar
7	Kendari	7	Jakarta Barat	7	Gunung Sugih	7	Kota Padang Sidempuan
8	Manado	8	Jakarta Selatan	8	Kalianda	8	Sei Rampah
		9	Bandung	9	Tanggamus	9	Painan
		10	Kota Cimahi	10	Cianjur	10	Maninjau
		11	Kuningan	11	Jejara	11	Teluk Kuantan
		12	Bekasi	12	Salatiga	12	Kuala Tungkal
		13	Cibinong	13	Kudus	13	Sungai Penuh
		14	Brebes	14	Banyumas	14	Sarolangun
		15	Pekalongan	15	Mungkid	15	Muara Sabak
		16	Sragen	16	Ambarawa	16	Muara Tebo
		17	Kebumen	17	Trenggalek	17	Martapura
		18	Kota Malang	18	Pacitan	18	Muaradua
		19	Banjarmasin	19	Sumenep	19	Prabumulih
		20	Samarinda	20	Kab. Madiun	20	Lebong
		21	Makassar	21	Amuntai	21	Tais
		22	Watampone	22	Pelaihari	22	Kepahiang
		23	Jayapura	23	Pangkalan Bun	23	Gedong Tataan
				24	Sambas	24	Sukadana
				25	Sengkang	25	Kota Banjar
				26	Pare-Pare	26	Soreang
				27	Praya	27	Ngamprah
				28	Bima	28	Bawean
				29	Manokwari	29	Buntok
						30	Kasongan
						31	Tamiyang Layang
						32	Sanggau
						33	Putusibau
						34	Tanjung Redep
						35	Tarakan
						36	Bontang
						37	Sanggata
						38	Nunukan
						39	Bulukumba
						40	Jeneponto
						41	Barru
						42	Selayar
						43	Parigi
						44	Unaaha
						45	Tondano
						46	Tilamuta
						47	Marisa
						48	Suwawa
						49	Bangli
						50	Gianjar
						51	Ruteng
						52	Atambua
						53	So'e
						54	Lewoleba
						55	Labuan Bajo
						56	Dataran Hunipopu
						57	Nabire
						58	Biak
						59	Wamena
						60	Serui
						61	Painai
						62	Kaimana

BADAN PERADILAN UMUM

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
1	Sub Dit Pengembangan Tenaga teknis		
2	Sub Dit Data dan Evaluasi		
3	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum		
4	Sub dit Tata Kelola		
5	Sub Dit Kasasi dan PK perdata khusus		
6	Sub Dit PK dan Grasi		

BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
1	Kabag Ren keu		
2	kabag ortala		
3	Kabag umum		
4	Sub Dir Pengembangan Tenaga Teknis Dilmil		
5	Sub Dir Kasasi Pidana dan Tata Usaha MIL		

BADAN PERADILAN AGAMA

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
1	kabag ortala		
2	Sub Dir Mutasi Hakim		
3	Sub Dir Pengembangan Tenaga teknis PA		
4	Sub dir Tata Kelola		
5	Sub Dir Kasasi Perdata Agama		

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan		
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan		
3	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan		
4	Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan		

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
1	Biro Umum	√	
2	Biro Perencanaan Dan Organisasi	√	
3	Bagian Bimbingan Dan Monitoring		
4	Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I		
5	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana		
6	Bagian Kesekretariatan Pimpinan A		
7	Bagian Perpustakaan Dan Layanan Informasi		
8	Bagian Perbendaharaan		
9	Bagian Rencana Dan Program		
10	Bagian Umum Kepegawaian		
11	Bagian Kesekretariatan Pimpinan E		

KEPANITERAAN

No.	Uraian	Eselon 2	Eselon 3
9	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian		
13	Panitera Muda Kamar Perdata		
15	Panitera Muda Kamar Militer		
16	Panitera Muda Kamar Tata Usaha Negara		



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2255/LIT.05/01-15/04/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Enam Berkas
Hal : Kerja Sama Survei Penilaian Integritas 2021

7 April 2021

**Yth. Menteri/Kepala Lembaga
c.q Inspektur/Kepala Satuan Pengawas Internal (Daftar K/L Terlampir)
di Tempat**

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal perlu disampaikan sebagai berikut:

1. SPI Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menjadi Prioritas Nasional dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
2. Kegiatan SPI bersifat *mandatory* dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua K/L/PD dan untuk pelaksanaan SPI 2021 pembiayaan akan ditanggung oleh DIPA KPK.
3. Dalam melaksanakan SPI Tahun 2021, KPK akan dibantu oleh Mitra (konsultan swasta) yang akan ditunjuk melalui mekanisme pengadaan (informasi disampaikan kemudian).
4. Kegiatan SPI Tahun 2021 berada di bawah koordinasi Inspektorat atau Satuan Pengawas Internal dengan didampingi oleh KPK.
5. Pada tahap awal persiapan pelaksanaan SPI tahun 2021 (April-Mei), diharapkan Kementerian/Lembaga untuk mulai mempersiapkan data populasi pegawai, pengguna layanan, dan eksper dengan format terlampir.

Selain itu sebagai upaya *sharing knowledge*, Direktorat Monitoring (d.h Direktorat Penelitian dan Pengembangan) KPK juga telah menyusun Buku Pintar yang berisi ringkasan 125 kajian terpilih dan monitoring sistem administrasi pemerintahan yang telah dilakukan sejak tahun 2005 hingga 2019 (buku terlampir).

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sari Angraeni (sari.angraeni@kpk.go.id) melalui telepon (021) 25578300 ext. 8045 atau Sdr. Timotius Hendrik Partohap (timotius.partohap@kpk.go.id) melalui telepon (021) 25578300 ext. 7391.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Alexander Marwata
Wakil Ketua

Tembusan:

1. Yth. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik
2. Yth. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas
3. Yth. Inspektur KPK

Lampiran Surat 1 (FORMULIR KERJA SAMA SPI)
Nomor : B/2255/LIT.05/01-15/04/2021
Tanggal : 7 April 2021

(KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA)

Nomor :
Tanggal :

**FORMULIR KERJA SAMA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya bertindak dan atas nama Kementerian/Lembaga

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peran aktif kelembagaan ini termasuk dalam bentuk ketersediaan data seperti data pegawai, pengguna layanan, dan narasumber pakar yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pernyataan ini sekaligus menyertakan daftar *Person In-Charge* (PIC) kegiatan yang akan menjadi penghubung secara teknis kegiatan SPI Tahun 2021, yakni:

No	Nama	Jabatan	Nomor Handphone	Email

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021
Sekretaris Jenderal.....

(.....)

Formulir yang ditandatangani dapat dikirim melalui pos ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950 dan melalui surat elektronik ke arrum.retnosari@kpk.go.id atau sari.angraeni@kpk.go.id, atau timotius.partohap@kpk.go.id.

Lampiran Surat 3 (FORM DATA POPULASI SPI)

Nomor : B/2255/LIT.05/01-15/04/2021

Tanggal : 7 April 2021

Formulir Populasi Internal/Pegawai:

No	Unit Kerja	Nama Pegawai	Tanggal/Bulan/Tahun Mulai Bekerja di Unit Kerja	Jabatan	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1						
dst						

Formulir Populasi Eksternal/Pengguna Layanan:

No	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan Publik yang Diterima	Nama Pengguna Layanan	Tanggal/Bulan/Tahun Mengurus Layanan Publik	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1						
dst						

Formulir Populasi Ekspert:

No	Kriteria Ekspert	Nama Ekspert	Jabatan/Jabatan Terakhir	No. HP (WA) aktif	e-mail aktif
1	Inspektorat/Pengawas Internal				
2	Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II)				
3	Pimpinan Lembaga minimal eselon I				
4	Auditor BPK				
5	Auditor BPKP				
6	Perwakilan Ombudsman				
7	Asosiasi pengusaha terkait sektor K/L atau pengusaha yang berpengaruh				
8	Jurnalis yang fokus terkait sektor K/L				
9	LSM atau NGO anti korupsi yang fokus terkait sektor K/L				
10	Akademisi/advisor				

Lampiran Surat 4 (DAFTAR PENERIMA SURAT)

Nomor : B/ 2255 /LIT.05/01-15/04/2021

Tanggal : 7 April 2021

Menteri/Kepala Lembaga:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretaris Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional)
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas)
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Riset dan Teknologi
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah
37. Badan Pemeriksa Keuangan
38. Mahkamah Agung
39. Mahkamah Konstitusi
40. Komisi Yudisial
41. Tentara Nasional Indonesia
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia
43. Kejaksaan Agung
44. Bank Indonesia
45. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
46. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
47. Komisi Penyiaran Indonesia
48. Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan
49. Ombudsman Republik Indonesia
50. Otoritas Jasa Keuangan
51. Lembaga Penjamin Simpanan
52. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

54. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
55. Badan Pengawas Pemilihan Umum
56. BPJS Kesehatan
57. BPJS Ketenagakerjaan
58. Badan Informasi Geospasial
59. Badan Intelijen Negara
60. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
61. Badan Kepegawaian Negara
62. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
63. Badan Koordinasi Penanaman Modal
64. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
65. Badan Narkotika Nasional
66. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
68. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
69. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
70. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
71. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
72. Badan Pengawas Obat dan Makanan
73. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
74. Badan Pusat Statistik
75. Badan Siber dan Sandi Negara
76. Badan Standardisasi Nasional
77. Badan Tenaga Nuklir Nasional
78. Lembaga Administrasi Negara
79. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
80. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
81. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
82. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
83. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
84. Arsip Nasional Republik Indonesia
85. Badan Amil Zakat Nasional
86. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
87. Badan Pengawas Pemilihan Umum
88. Badan Pengelola Keuangan Haji
89. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
90. Dewan Jaminan Sosial Nasional
91. Dewan Pengupahan Nasional
92. Dewan Pers
93. Kantor Staf Presiden
94. Komisi Aparatur Sipil Negara
95. Komisi Informasi Pusat
96. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
97. Komisi Kejaksaan
98. Komisi Kepolisian Nasional
99. Komisi Nasional Disabilitas
100. Komite Akreditasi Nasional
101. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
102. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
103. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
104. Lembaga Sensor Film
105. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Inspektur/Kepala Satuan Pengawas Internal:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretaris Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertanahan Nasional)
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas)
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Riset dan Teknologi
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Dewan Perwakilan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Daerah
37. Badan Pemeriksa Keuangan
38. Mahkamah Agung
39. Mahkamah Konstitusi
40. Komisi Yudisial
41. Tentara Nasional Indonesia
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia
43. Kejaksaan Agung
44. Bank Indonesia
45. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
46. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
47. Komisi Penyiaran Indonesia
48. Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan
49. Ombudsman Republik Indonesia
50. Otoritas Jasa Keuangan
51. Lembaga Penjamin Simpanan
52. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
54. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
55. Badan Pengawas Pemilihan Umum
56. BPJS Kesehatan
57. BPJS Ketenagakerjaan
58. Badan Informasi Geospasial

59. Badan Intelijen Negara
60. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
61. Badan Kepegawaian Negara
62. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
63. Badan Koordinasi Penanaman Modal
64. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
65. Badan Narkotika Nasional
66. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
68. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
69. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
70. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
71. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
72. Badan Pengawas Obat dan Makanan
73. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
74. Badan Pusat Statistik
75. Badan Siber dan Sandi Negara
76. Badan Standardisasi Nasional
77. Badan Tenaga Nuklir Nasional
78. Lembaga Administrasi Negara
79. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
80. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
81. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
82. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
83. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
84. Arsip Nasional Republik Indonesia
85. Badan Amil Zakat Nasional
86. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
87. Badan Pengawas Pemilihan Umum
88. Badan Pengelola Keuangan Haji
89. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
90. Dewan Jaminan Sosial Nasional
91. Dewan Pengupahan Nasional
92. Dewan Pers
93. Kantor Staf Presiden
94. Komisi Aparatur Sipil Negara
95. Komisi Informasi Pusat
96. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
97. Komisi Kejaksaan
98. Komisi Kepolisian Nasional
99. Komisi Nasional Disabilitas
100. Komite Akreditasi Nasional
101. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
102. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
103. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
104. Lembaga Sensor Film
105. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

Survei Penilaian Integritas



Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Tahun 2021

Berikut adalah detail penjelasan SPI 2021:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 akan dilaksanakan secara online (e-SPI) pada 542 Pemerintah Daerah dan 84 Kementerian/Lembaga.
2. Dalam melaksanakan e-SPI, KPK akan dibantu oleh konsultan swasta yang saat ini sedang dalam proses pemilihan (akan diinformasikan kemudian).
3. Penjelasan lampiran:
 - A. Lampiran 1 (Formulir Kerjasama SPI Tahun 2021)
 1. Formulir ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dari Kementerian/Lembaga
 2. *Person In Charge* (PIC) adalah personil di dalam Kementerian/Lembaga yang bertugas:
 - Mengkoordinasikan kegiatan SPI di dalam internal Kementerian/Lembaga (antar unit kerja).
 - Menjadi penghubung teknis kegiatan SPI antara Kementerian/Lembaga, KPK, dan konsultan swasta yang terpilih melaksanakan SPI.
 3. Dengan demikian, sebaiknya komposisi PIC yang ditunjuk oleh Menteri/Kepala Lembaga adalah terdiri dari pejabat strategis, penanggungjawab utama, dan staf teknis. Pejabat strategis dapat diisi oleh pejabat eselon 2 di Kesetjengan (mengkoordinasikan antar unit kerja yang terpilih sebagai sampling SPI), penanggungjawab utama dapat diisi oleh pejabat eselon 2 di Inspektorat/Satuan Pengawas Internal (bertanggungjawab secara teknis kegiatan SPI di Kementerian/Lembaga), dan staf teknis dapat diisi oleh eselon 3/eselon4/staf di Inspektorat/Satuan Pengawas Internal (membantu pejabat eselon 2 yang menjadi penanggungjawab SPI pada Inspektorat/Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan teknis kegiatan SPI di Pemda).
 4. PIC dapat berjumlah antara 3 s.d 5 orang.
 5. Formulir dapat diberikan kepada KPK paling lambat 23 April 2021 melalui:
 - Pos ke alamat KPK: Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 - Atau email ke alamat: arrum.retnosari@kpk.go.id, timotius.partohap@kpk.go.id, sari.angraeni@kpk.go.id
 - B. Lampiran 2 (Informasi Karakteristik Kementerian/Lembaga)
 1. Untuk kebutuhan penentuan mekanisme sampling pada Kementerian/Lembaga dibutuhkan Informasi mengenai karakteristik Kementerian/Lembaga secara bagan/statistik/narasi yang berisi:
 - a. Gambaran struktur organisasi (tingkat pusat hingga vertikal/UPT di daerah)
 - b. Data jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja
 - c. Data layanan publik yang ada di Kementerian/Lembaga beserta keterangan nama unit kerja yang menangani layanan publik tersebut.
 - d. Data kisaran jumlah pengguna layanan pada masing-masing unit kerja

6. Informasi karakteristik Kementerian/Lembaga tersebut disampaikan ke KPK bersamaan dengan form kerjasama yaitu paling lambat 23 April 2021 melalui:
 - o Pos ke alamat KPK: Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 - o Atau email ke alamat: arrum.retnosari@kpk.go.id, timotius.partohap@kpk.go.id, sari.angraeni@kpk.go.id

C. Lampiran 3 (Formulir Data Populasi SPI)

1. Formulir data populasi dapat diberikan kepada KPK paling lambat 7 Juni 2021 dengan format *softcopy* (dapat disimpan dalam *g-drive*) dan *link g-drive* dikirim ke KPK melalui email ke alamat: arrum.retnosari@kpk.go.id, timotius.partohap@kpk.go.id, sari.angraeni@kpk.go.id
2. Formulir Populasi Internal/Pegawai:
 - a. Data populasi ini merupakan data pegawai paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Kementerian/Lembaga.
 - b. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan data jabatan dan masa kerja pada unit kerja tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - c. Kriteria pegawai yang masuk dalam formulir data populasi adalah:
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut
 - o Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut. Sehingga, ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service, security, driver, dst, tidak perlu dimasukkan dalam formulir data populasi.
 - o Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
3. Formulir populasi eksternal/pengguna layanan:
 - a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2020 s.d Mei 2021) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
 - b. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, maka mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/pegawai dari perusahaan tersebut.
 - c. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan unit kerja (tempat mengurus layanan publik) dan nama/jenis layanan publik yang diterima/diurus oleh pengguna layanan tersebut akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - d. Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam formulir data populasi:

- Seluruh pengguna layanan yang mengurus layanan pada 1 tahun terakhir (Juni 2020 s.d Mei 2021) pada unit kerja tersebut.
 - Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2021 – Mei 2021).
4. Formulir populasi eksper:
- a. Data eksper/pakar/stakeholder merupakan personil dengan 10 kriteria terlampir yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Kementerian/Lembaga.
 - b. Jika eksper/pakar/stakeholder merupakan instansi/lembaga/organisasi/asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personil/penanggungjawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan Informasi yang mumpuni/memadai terhadap pemda tersebut.
 - c. Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor hp/wa dan alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan kriteria eksper dan jabatan eksper akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden eksper yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.

Terima kasih atas kerjasama Bapak/Ibu.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/13/RB.01/2021

23 Juni 2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : **Penyampaian Informasi Pemanfaatan
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
KPK sebagai Nilai Hasil Survei
Eksternal Persepsi Anti Korupsi dalam
Evaluasi RB**

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal Kementerian;**
2. **Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
3. **Sekretaris Kementerian;**
4. **Sekretaris Mahkamah Agung;**
5. **Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
6. **Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;**
7. **Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;**
8. **Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;**
9. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan**
10. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.**

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi diawali dengan penilaian mandiri oleh seluruh instansi pemerintah secara daring (online) melalui pmprb.menpan.go.id. Oleh karenanya, diharapkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk dapat mengisi seluruh komponen penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit
 1. Subkomponen Pemenuhan (Mandatory)
 2. Subkomponen Hasil Antara
 3. Subkomponen Perubahan (Reform)
2. Komponen Hasil
 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
 2. Kualitas Pelayanan Publik
 3. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
 4. Kinerja Organisasi

Berdasarkan surat kami sebelumnya Nomor B/524/RB.06/2021 Tanggal 29 April 2021, Hal Mekanisme Penyampaian PMPRB Tahun 2021, bahwa PMPRB akan mulai diisi tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah itu,

Kementerian PANRB selaku Tim RB Nasional akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan RB kepada seluruh Instansi Pemerintah yang telah menyampaikan PMPRB secara online.

Perlu kami informasikan bahwa khusus untuk survei pengukuran Sub Komponen Hasil Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, mulai tahun ini akan menggunakan Angka/Indeks dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sehingga Survei Eksternal Persepsi Anti Korupsi yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian PANRB tidak akan dilakukan mulai tahun ini.

Selanjutnya perlu juga kami informasikan bahwa untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik tetap dilaksanakan survei eksternal Persepsi Kepuasan Pelayanan oleh Kementerian PANRB melalui shprbzi.menpan.go.id. dan untuk mengukur Kinerja Organisasi melalui survei internal juga akan tetap dilaksanakan langsung oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Oleh sebab itu, diharapkan partisipasi aktif instansi Bapak/Ibu sebagai peserta SPI Tahun 2021 yang dilakukan KPK sehingga penilaian RB dapat dilaksanakan secara utuh.

Demikian informasi disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan**



ERWAN AGUS PURWANTO

Tembusan

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK